

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali Moertopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*, Jakarta : Jajasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar : Phinatama Media

Amirruddin & H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta : Yayasan Perludem

Eddy Purnama, 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Nusamedia.

Fazlur Rahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, 2020, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Yogyakarta : Litera

Haris Syamsudin, 2005, *Pemilu Langsung di tengah-tengah Oligarki Partai*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemilihan Umum, 2022, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
- Miriam Budiarjo, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Prajudi Atmosudirjo, 1996. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Grialia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

#### B. JURNAL/MAKALAH/TESIS

Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxliary State's Organs Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 1, 2014

Deni Nurdyana Hadimin, *Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif yang Ideal dalam Membangun Pemerintahan Daerah yang Lebih Demokratis*, Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 13 No. 1

Fauzia Sholikhathi Nurul Jannah, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023

Imam Bahri Widyanda Mansyur, *Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penangan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

Lusy Liana, *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, Lex Jurnalica Vol. 15 No. 3, December 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Hukum, Jakarta, 7 September 2004

\_\_\_\_\_, dkk, *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Jakarta : Sekretariat

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013

Moh. Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Jurnal Khazanah

Hukum, Vol. 2 No. 3

Muhammad Muhtarom, *Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia di Era*

*Reformasi*, Isharaj Vol. IV No. 2

Noor Iftah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam*

*Perspektif Pemilu Berintegritas : Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi*

*Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu*

*Legislatif Tahun 2014*, Jurnal Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia,

Edisi 2, September 2020

Sakhroli dan Dian Permata, *Dinamika dan Tantangan Pengawasan Tahapan*

*Pencalonan Anggota DPRD dan DPRD pada Pelaksanaan Pemilu 2024*,

Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta, Februari 2024

Syamsudin Haris, *Struktur. Proses dan Fungsi Pemilihan umum, Catatan*

*Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945

UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN

UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN  
2022 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN  
PEMILIHAN UMUM ADMINISTRATIF

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN  
2023 TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN/KOTA